





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI



# LAPORAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

# 2022

-  Kebudayaan Indonesia
-  budayasaya
-  Ditjen Kebudayaan
-  Budaya Saya







# LAPORAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

**2022**



# Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**



**Fitra Arda**



# Daftar Isi

- i Kata Pengantar
- iii Daftar Isi
- iv Ikhtisar Eksekutif
- v Permasalahan Umum & Langkah Antisipasi

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- Gambaran Umum 01
- Dasar Hukum 02
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 03
- Isu dan Peran Strategis 05

01.

06.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 06 Visi, Misi, dan Tujuan
- 07 Rencana Kinerja Jangka Menengah
- 08 Perjanjian Kinerja Awal
- 09 Perjanjian Kinerja Akhir
- 10 Program Prioritas

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- Capaian Kinerja 11
- Realisasi Anggaran 26
- Efisiensi Anggaran 27
- Inovasi 27
- Penghargaan 28
- Program Crosscutting 29

11.

30.

## **BAB IV. PENUTUP**

- 30 Ringkasan Kinerja
- 32 Langkah Kerja ke Depan

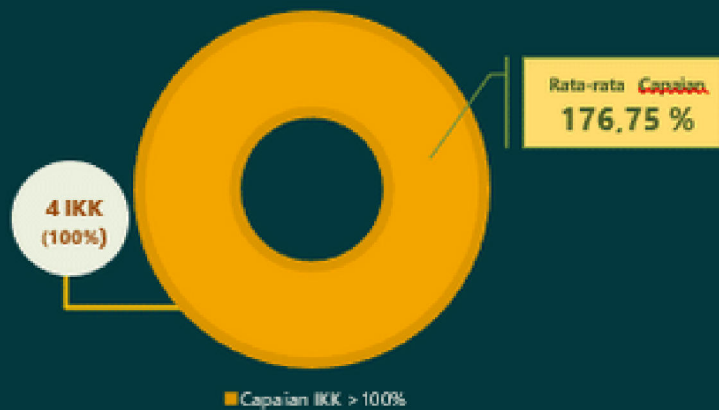
## **LAMPIRAN**

34.

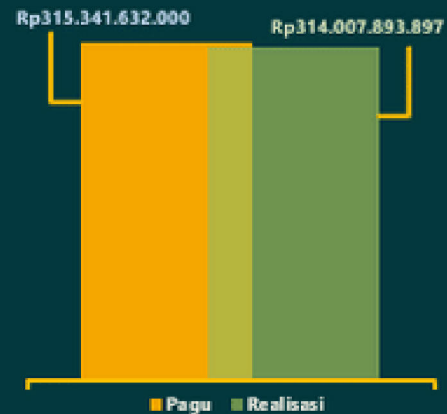
# Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

## Capaian Kinerja

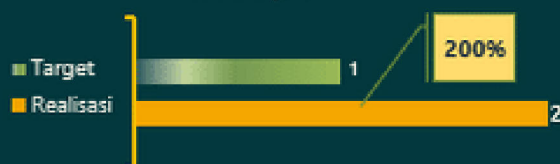


## Penyerapan Anggaran



SK Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan kebudayaan

### IKK Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan



SK Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang yang dikelola

### IKK Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan



SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

### IKK Persentase Satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP min BB



### IKK Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM





# Permasalahan Umum

- Perbedaan waktu antar negara anggota G20 dan Indonesia – Qatar menyebabkan kendala dalam koordinasi pelaksanaan event, seperti rapat pleno penyusunan Concept Note, Academic Paper, dan Join Ministerial Statement G20 bidang Kebudayaan
- Belum lengkapnya persyaratan administrasi yang diajukan oleh pengusul/calon penerima Fasilitasi Bidang Kebudayaan seperti SK Kemenkumham, Akta Notaris, buku rekening bank, dll yang dapat menyebabkan potensi gugurnya pengusul/calon penerima ke tahap penandatanganan kontrak
- Perubahan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan menyebabkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pembentukan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) kurang optimal

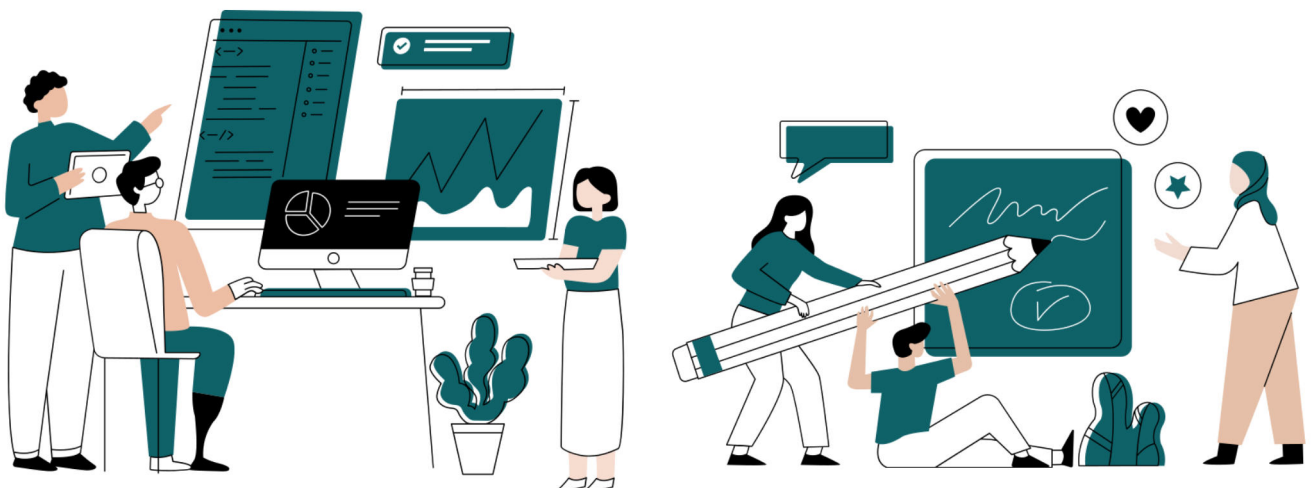
# Langkah Antisipasi

- Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meminta bantuan kedutaan negara yang bersangkutan di Jakarta dan juga KBRI di negara setempat untuk membantu proses koordinasi
- Memberikan kelonggaran waktu kepada calon penerima untuk dapat memenuhi kelengkapan syarat administrasi
- Mempercepat penyusunan rincian tugas dan fungsi, peta proses bisnis, analisis peta jabatan dan beban kerja berdasarkan susunan organisasi yang baru agar pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) dapat dilaksanakan dengan optimal

# Bab I Pendahuluan

## GAMBARAN UMUM

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak November 2020 hingga saat ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Fitra Arda dengan jumlah SDM sebanyak 206 pegawai. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan wilayah kerja sebanyak 40 satuan kerja/upt di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.



# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

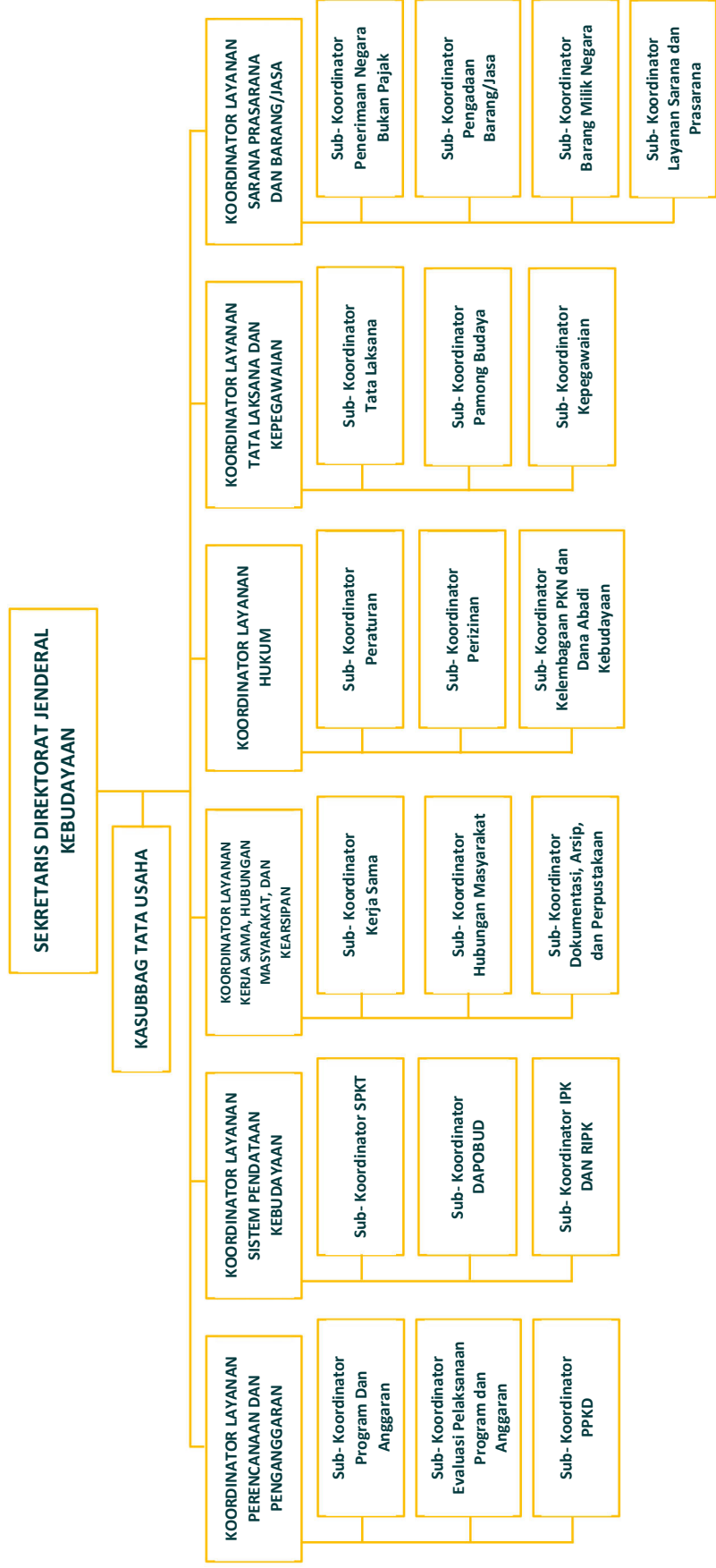
## Tugas

Melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

## Fungsi

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan
2. Pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang kebudayaan
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan
4. Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal
5. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal  
Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal
7. Penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pamong budaya
8. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang
9. kebudayaan  
Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program,
11. kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan  
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal
- 12.

# STRUKTUR ORGANISASI



# Isu Strategis

- Belum optimalnya manajemen tata kelola di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, antara lain:
  - peningkatan nilai SAKIP masih belum maksimal
  - belum optimalnya jumlah satker yang dibina menuju WBK
  - perencanaan dan program untuk pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang ditargetkan masih belum terstruktur dengan baik
- Belum optimalnya implementasi sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi program serta kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

# Peran Strategis

- Penguatan Manajemen Tata Kelola yang berkualitas untuk peningkatan nilai sakiP, peningkatan predikat ZI-WBK di seluruh satker, Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran
- Penguatan Perencanaan dan Evaluasi di lingkungan Setditjen Kebudayaan melalui koordinasi secara intensif

# Bab II

# Perencanaan

# Kinerja

## Visi

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

## Misi

**1** Meningkatkan kualitas manusia Indonesia

**2** Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

**3** Mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

## Tujuan

- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

# Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

	Uraian	Satuan	Target PK 2022	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024
1.0	<b>SK Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan</b>				
1.1	<b>IKK Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan/ Event</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.0	<b>SK Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola</b>				
2.1	<b>IKK Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola</b>	<b>Orang/ Kelompok Masyarakat</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
3.0	<b>SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan</b>				
3.1	<b>IKK Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB</b>	<b>%</b>	<b>62.5</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
3.2	<b>IKK Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM</b>	<b>satker</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



# Perjanjian Kinerja 2022 (Awal)

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/ Event	1
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	150
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	62.5
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	10

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	66.679.164.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	285.670.205.000
	Total	352.349.369.000

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2022 sebesar Rp 352.349.369.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2022 DIPA Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp 315.340.632.000. Perubahan ini terjadi karena adanya beberapa kali refocussing anggaran selama tahun 2022. Selain dari segi anggaran, tidak ada perubahan komponen lainnya dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022.

## Perjanjian Kinerja 2022 (Akhir)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/ Event	1
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	150
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	62.5
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	10

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	52.516.307.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	262.824.325.000
	Total	315.340.632.000

# Program Prioritas

## 01. G20

G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu anggota dari G20. Untuk menjaga keberlangsungan kelompok ini, setiap tahun negara-negara pertemuan pimpinan negara G20 menentukan negara yang akan memegang Presidensi di tahun berikutnya termasuk dalam troika, tahun ini, tahun depan dan dua tahun mendatang.

Pada tahun 2022, Indonesia didaulat sebagai pemegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan berbagai sektor dalam G20, termasuk sektor kebudayaan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kehebatan budaya Indonesia, keberagaman, nilai-nilai yang luar biasa yang menjadi sumber pengetahuan, sumber inspirasi dan sumber penghidupan. Selain itu, melalui sektor kebudayaan, dialog antar bangsa akan dibuat lebih cair dan memainkan perannya untuk stabilitas ekonomi, berkontribusi untuk perbaikan kehidupan sosial pasca pandemic serta perdamaian dunia. Dalam kesempatan ini pula, Indonesia akan menunjukkan peran melalui kebudayaan memberi kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

## 03. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Tahun ini FBK mengakat tema “Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan”. Kearifan lokal menjadi dasar untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam dan manusia. Untuk mendukung ketahanan budaya, maka diperlukan fasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan bagi masyarakat luas.

## 02. Qatar Year of Culture

Indonesia mendapat kehormatan dipilih sebagai Negara Mitra (partner country) dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture 2023. Year of Culture adalah program pertukaran budaya yang diprakarsai oleh Museum Nasional Qatar sejak tahun 2012 untuk mempromosikan saling pengertian, pemahaman dan penghargaan antar negara. Melalui program ini masyarakat diajak untuk mengeksplorasi dan merayakan persamaan budaya serta perbedaan yang dimiliki. Program ini akan diselenggarakan selama satu tahun penuh baik di Qatar maupun di Negara Mitra. Setiap tahun Pemerintah Qatar memilih satu negara sebagai negara mitra (partner country) dalam menyelenggarakan kegiatan pameran, festival, pertunjukan, kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya dalam lingkup seni, budaya, pendidikan, heritage, dan olahraga, baik di Qatar maupun negara mitra. Qatar Year of Culture 2023 sangat potensial dimanfaatkan oleh Pemerintah RI bukan hanya sebagai ajang diplomasi budaya, tetapi juga promosi ekonomi, perdagangan dan investasi. Promosi penyelenggaraan Year of Culture akan dilaksanakan jauh-jauh hari dan oleh karenanya perlu persiapan dengan matang. Pada tahun 2022 Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, sehingga promosi kegiatan Year of Culture 2023 juga dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022.

# Bab III

# Akuntabilitas

# Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1	1	100 %
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150	272	181 %
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	62.5	97,5	156 %
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10	17	170 %

# Sasaran Kegiatan 1

## Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan

Keberhasilan dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan. Ketercapaian dari Sasaran Kegiatan ini pada tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator kegiatan yang melebihi target. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berhasil melaksanakan 2 event prioritas. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### IKK 1.1 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

Pada tahun 2022, dari target 1 event, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil mencapai 2 event prioritas bidang kebudayaan sehingga ketercapaian indikator kegiatan event prioritas bidang kebudayaan sebesar 200%. Ketercapaian tersebut didukung kegiatan event yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu event G20 bidang Kebudayaan atau G20 Culture Ministers Meeting (CMM) dan Qatar-Indonesia year of culture.



Pada tahun 2022, Indonesia didaulat sebagai pemegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan berbagai sektor dalam G20, salah satunya termasuk sektor kebudayaan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kehebatan budaya Indonesia, keberagaman, nilai-nilai yang luar biasa yang menjadi sumber pengetahuan, sumber inspirasi dan sumber penghidupan. Selain itu, sektor kebudayaan memiliki peran untuk stabilitas ekonomi, berkontribusi untuk perbaikan kehidupan sosial pasca pandemic serta perdamaian dunia.



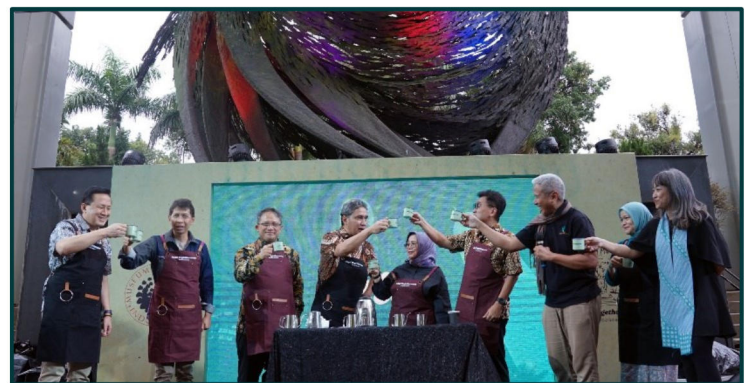
Event G20 diselenggarakan dengan mengambil tema “Kebudayaan Untuk Bumi Lestari” bertempat di Kawasan Candi Borobudur, Magelang. Event ini merupakan pertemuan menteri kebudayaan yang berfokus pada dua tujuan utama untuk mendorong agenda pemulihan global berdasarkan potensi budaya dengan agenda:

- a. Membangun konsensus global untuk praktik kehidupan yang lebih berkelanjutan.
- b. Memprakarsai agenda pemulihan global melalui pembentukan Global Arts dan Dana Pemulihan Budaya.

**List of G20 CMM Participants  
13 September 2022**

No	COUNTRY	NAME	DESIGNATION	MINISTER	ATTENDANCE
1	Indonesia	H.E. Nadiem Makarim	Minister of Education, Culture, Research and Technology	Yes	In Person
	Italy	H.E. Dario Franceschini	Minister of Culture	Yes	Online
3	India	H.E. Shri Arjun Ram Meghwal	Minister of State for Culture	Yes	In Person
4	Argentina	H.E. Tristan Bauer	Minister of Culture	Yes	Online
5	China	H.E. Hu Heping	Minister of Culture and Tourism	Yes	Online
6	Germany	H.E. Claudia Benedikta Roth	Minister of State for Culture and the Media	Yes	In Person
7	Japan	H.E. Yana Kazuo	State Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology	Yes	Online
8	Rep. of Korea	H.E. Park Bo-Gyoon	Minister of Culture, Sports and Tourism	Yes	In Person
9	Mexico	H.E. Alejandra Frausto Guerrero	Minister of Culture	Yes	Online
10	Saudi Arabia	H.H. Badr bin Farhan Al-Saud	Minister of Culture	Yes	In Person
11	UK	Lord Parkinson	Minister for Arts	Yes	Online
12	Canada	Isabelle Mondou	Deputy Minister for Canadian Heritage	No	Online
13	Russia	Alla Manilova	State-Secretary - Deputy Minister of Culture	No	Online
14	Brazil	Hélio Ferraz de Oliveira	Special Secretary for Culture	No	In Person
15	EU	Themis Christophidou	Director-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission	No	Online
16	South Africa	Vusithemba Ndima	Acting Director-General, Department of Sport, Arts and Culture	No	Online
17	USA	Lee Satterfield	Assistant Secretary of State for Educational and Cultural Affairs	No	In Person
18	Australia	Penny Williams	Ambassador of Australia to Indonesia	No	In Person
19	France	Stéphane Dovert	Counsellor for Cooperation and Cultural Action, French Embassy in Indonesia	No	In Person
20	Türkiye	Ömer Orhun Çelikkol	Deputy Head of Mission/First Counsellor, Embassy of Türkiye in Indonesia	No	In Person
<b>INVITEES</b>					
21	Cambodia	Phoeurng Sackona	Minister of Culture and Fine Arts	Yes	In Person
22	Netherlands	Gunay Uslu	State Secretary for Education, Culture and Science	Yes	In Person
23	Senegal	Abdoulaye Diop	Minister of Culture and Communication	Yes	Online
24	Singapore	Edwin Tong	Minister for Culture, Community and Youth	Yes	In Person
25	Fiji	Selai Adimaitoga	Assistant Minister for iTaukei Affairs	No	In Person
26	Spain	Isaac Sastre de Diego	Director General of Cultural Heritage and Fine Arts	No	In Person
27	UAE	Mubarak Al Nakhi	Undersecretary of Culture and Youth	No	In Person
28	UNESCO	Ernesto Ottone Ramirez	Assistant Director-General for Culture	No	In Person

Selain G20. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan kegiatan event prioritas bidang kebudayaan 'Kopi Togetherness'. Sepanjang tahun 2023, Indonesia akan menjadi negara mitra penyelenggaraan Qatar Year of Culture. Kedua negara sepakat mengangkat kopi sebagai tema besar. Untuk itu pada Tahun 2022, telah diselenggarakan Pameran dan Festival 'Kopi Togetherness' yang juga menjadi *kick-off* dari kerjasama bilateral Indonesia dan Qatar. Pameran dan Festival ini bertempat di Area Sunken Museum Nasional Indonesia pada tanggal 19 November s.d. 18 Desember 2022 yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.



'Kopi Togetherness' adalah suatu upaya menghadirkan kopi dari berbagai sisi sejarah, kehidupan alam dan lingkungan, kebudayaan masyarakat Indonesia, dengan kebersamaan menjadi payungnya, mengajak publik merayakan Kebersamaan Kopi dari Bumi, Budaya dan Manusia Indonesia dengan menggali berbagai hubungan antara masyarakat Indonesia dengan kopi. Pameran dan Festival "Kopi Togetherness yang menghadirkan serangkaian program publik yang menawarkan pengetahuan, rekreasi dan selebrasi kopi nusantara bersama jejaring komunitas produsen, penggiat dan penggemar kopi dengan menggali berbagai hubungan antara masyarakat Indonesia dengan kopi. Pameran 'Kopi Togetherness' dibagi 5 subtema: Kopi Bumi, Kultur Kopi, Kopi Kini, Kopi Kita, dan Kopi Merdeka.



### Hambatan & Permasalahan

- Perbedaan waktu antara Indonesia dengan setiap negara G20 untuk berkoordinasi dan komunikasi
- Terdapat kendala koordinasi dengan negara anggota G20 karena pada bulan Juni-Juli-Agustus banyak negara yang sedang libur musim panas, sehingga responnya agak lambat
- dalam pelayanan panitia yang berikan masih kurang maksimal hal ini disebabkan karena perubahan jadwal yang mendadak menyebabkan terjadi miskoordinasi anatar panitia sehingga mempengaruhi pelayanan yang diberikan.

### Langkah Antisipasi

- Menyesuaikan dengan waktu yang paling tepat untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan setiap negara.
- Meminta bantuan kedutaan negara yang bersangkutan di Jakarta dan juga KBRI di negara setempat untuk membantu mempercepat respon
- Rapat Koordinasi dengan koordinator panitia dari masing2 bidang untuk menyusun jadwal perubahan dan menyiapkan sarpras di lapangan sebelum acara rangkaian G20 dimulai.

### Strategi

- mengoptimalkan pertemuan untuk koordinasi dan komunikasi di setiap kesempatan.
- memberikan surat pemberitahuan kepada kedutaan negara dan KBRI untuk berkoordinasi secara langsung
- melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal perubahan dan memastikan kondisi sarana dan prasarana di lapangan telah siap digunakan.



الأعوام الثقافية  
YEARS OF CULTURE

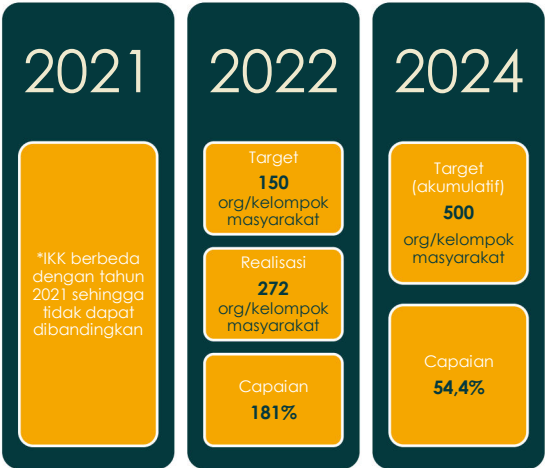


# Sasaran Kegiatan 2

## Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Keberhasilan dari Sasaran Kegiatan Meningkatkan jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola. Ketercapaian dari Sasaran Kegiatan ini pada tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator kegiatan yang melebihi target. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berhasil mengelola sebanyak 272 fasilitasi bidang kebudayaan yang dibagi ke dalam enam kategori. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### IKK 2.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola



Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk dana hibah yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/ pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) secara luas.

Salah satu faktor **keberhasilan** realisasi pada Indikator Kinerja ini mencapai 272 penerima fasilitasi dengan capaian 181% karena kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan didasarkan pada proposal sehingga dapat mengoptimalkan jumlah *output* tanpa mengurangi *unit cost*. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena di tahun 2022 sudah terdapat kelonggaran dalam melakukan kegiatan di ruang public yang dapat menghimpun massa atau orang banyak. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya terdapat pembatasan yang mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan di ruang publik dan menghimpun massa akibat dampak dari pandemi COVID-19.

Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 208. Kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2020, namun tidak termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja sehingga capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan capaian di tahun 2022.

Tema pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Bidang Kebudayaan Tahun 2022 adalah “Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan.” Tema ini dipilih karena merupakan tiga fondasi utama yang menjadi landasan untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam dan manusia, yang lantas berkembang dan menjadi kekayaan budaya Indonesia hingga kini. Untuk penerima bantuan FBK pada tahun 2022 akan diprioritaskan kepada komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan yang berdomisili dan akan

melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah 3T, berada di provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2020 lebih rendah dari nilai IPK Nasional Tahun 2020, yang secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif disabilitas, yang secara programatik melibatkan perempuan sebagai aktor utama dan bertujuan untuk promosi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Pelaksanaan Fasilitas Bidang Kebudayaan Tahun 2022 terbagi ke dalam tujuh kategori.



## Hambatan & Permasalahan

- Permasalahan sistem website FBK dari waktu ke waktu
- Saat launching Dana Indonesiana, seluruh data FBK pindah ke domain baru dari fbk.id ke laman danaindonesiana.kemdikbud.go.id sehingga terdapat eror pada saat pemindahan sistem
- Proses penilaian proposal oleh komite seleksi kurang sesuai dengan timeline yang telah dibuat sehingga waktu seleksi mengalami kemunduran;
- Ada beberapa pengusul yang tidak menerima hasil seleksi (kendala saat pengiriman pengumuman)
- Terdapat sedikit kemunduran waktu dalam verifikasi lapangan akibat kebutuhan persiapan yang cukup lama dan terbatasnya sumber daya manusia
- Beberapa pengusul/calon penerima tidak melengkapi persyaratan administrasi seperti SK Kemenkumham, Akta Notaris, buku rekening bank, dll yang dapat menyebabkan potensi gugurnya pengusul/calon penerima ke tahap penandatanganan kontrak.

## Langkah Antisipasi

- Sosialisasi dan pendampingan ke pendaftar terkait kendala yang dialami
- Sosialisasi terkait dengan perpindahan laman fbk.id ke danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Proses perpindahan laman dilakukan setelah pendaftaran FBK ditutup agar tidak mengganggu berlangsungnya proses pendaftaran.
- Terdapat helpdesk untuk masyarakat menanyakan informasi kapan saja
- Tim website segera mencari sumber eror untuk segera menyelesaikan masalah terkait pemindahan sistem
- Ditambahkan jumlah personil verifikator lapangan agar dapat melaksanakan verifikasi lapangan sesuai jadwal
- Memberikan kelonggaran waktu kepada calon penerima untuk dapat memenuhi kelengkapan syarat administrasinya sampai dengan 24 Oktober 2022.

## Strategi

- Membuat pembaharuan perangkat lunak yang ada di sistem website FBK.
- Mendorong pengembang aplikasi untuk melakukan percepatan pemindahan domain baru.
- Memberikan ruang untuk tanya jawab terhadap peserta yang kesulitan karena keterlambatan waktu melalui help desk.
- Melakukan sosialisasi terkait perpindahan sistem dari laman fbk.id ke laman danaindonesiana.kemdikbud.go.id
- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk melaksanakan verifikasi lapangan kepada pengusul FBK.

# Sasaran Kegiatan 3

## Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Keberhasilan dari Sasaran Kegiatan Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Ketercapaian dari Sasaran Kegiatan ini pada tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator kegiatan yang melebihi target. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengusulkan 15 satker untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 2 satker untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM). Selain itu 97,5% satker di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan predikat SAKIP minimal BB yang menandakan bahwa terjadi peningkatan kualitas tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### IKK 3.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1 ini berbeda dengan IKK tahun sebelumnya (2021) sehingga tidak dapat dibandingkan, dimana IKK 2021 adalah "Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB" dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 IKK "Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB" berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,5% satker dari target 62,5% mendapatkan predikat SAKIP minimal BB.

Dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021, nilai SAKIP diperoleh dari total nilai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan bobot masing-masing komponen. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP antara 70 - 80 dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Bobot Nilai	
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

### Klasifikasi nilai dan predikat SAKIP

Interpretasi Predikat	
<b>AA</b> Sangat Memuaskan >90-100	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
<b>A</b> Memuaskan >80-90	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
<b>BB</b> Sangat Baik >70-80	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.
<b>B</b> Baik >60-70	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2/unit kerja.
<b>CC</b> Cukup >50-60	Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
<b>C</b> Kurang >30-50	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
<b>D</b> Sangat Kurang 0-30	Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB didapatkan dengan membandingkan antara jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai SAKIP minimal BB dengan jumlah seluruh satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada tahun 2022 dari 40 satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan, 26 satker mendapatkan predikat A, 13 satker mendapatkan predikat BB, dan 1 satker mendapatkan predikat B.

No	Kode Satker	Satuan Kerja / Direktorat	Nilai SAKIP 2021		Nilai SAKIP 2022	
	15	DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	81,24	A	81,40	A
1	427832	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH	83,72	A	89,10	A
2	189646	DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT	86,92	A	87,75	A
3	547712	KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA	84,87	A	87,00	A
4	690433	DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN	83,51	A	86,65	A
5	567958	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH	68,25	B	85,60	A
6	690432	DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA	70,72	BB	85,60	A
7	613531	GALERI NASIONAL INDONESIA	81,44	A	84,90	A
8	477783	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR	74,96	BB	84,10	A
9	427826	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BALI	75,48	BB	83,50	A
10	526065	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI	80,81	A	82,75	A
11	427843	BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN	81,76	A	82,75	A
12	422888	KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL, JAKARTA	72,44	BB	82,60	A
13	568911	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI	79,66	BB	82,50	A
14	526051	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT	74,71	BB	82,20	A
15	427775	BALAI KONSERVASI BOROBUDUR	81,1	A	81,55	A
16	606393	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT	76,3	BB	81,15	A
17	427801	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR	73,97	BB	81,10	A
18	189643	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	80,62	A	80,95	A

No	Kode Satker	Satuan Kerja / Direktorat	Nilai SAKIP 2021		Nilai SAKIP 2022	
			Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
19	690434	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN	76,37	BB	80,75	A
20	606408	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PAPUA	70,87	BB	80,65	A
21	427857	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN	72,22	BB	80,40	A
22	477792	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO	73,21	BB	80,35	A
23	526044	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH	67,93	B	80,30	A
24	427818	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN	70,38	BB	80,15	A
25	690435	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	74,85	BB	80,15	A
26	547705	KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA	80,73	A	80,15	A
27	427894	KANTOR MUSEUM SUMPAH PEMUDA, JAKARTA	72,43	BB	79,75	BB
28	526019	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT	74,4	BB	79,70	BB
29	902745	SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM	75,05	BB	79,60	BB
30	526002	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA JAWA BARAT	65,27	B	79,30	BB
31	477803	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MALUKU UTARA	71,6	BB	78,25	BB
32	568904	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MALUKU	67,01	B	78,00	BB
33	025226	MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI	76,1	BB	77,05	BB
34	427842	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA	69	B	76,65	BB
35	621886	KANTOR MUSEUM BASOEKI ABDULLAH, JAKARTA	73,49	BB	74,30	BB
36	427781	KANTOR MUSEUM NASIONAL	73,95	BB	72,95	BB
37	427798	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA	67,32	B	71,75	BB
38	526023	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI UTARA	64,03	B	71,35	BB
39	526040	BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN	69,69	B	70,65	BB
40	526003	BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU	39,06	C	66,25	B

Pada tahun 2022, jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat SAKIP A dan BB sebesar 97,5% dari 40 satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana jumlah satker yang mendapat predikat SAKIP A dan BB hanya sebesar 76,92%.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha untuk melakukan pendampingan kepada satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini merupakan faktor **keberhasilan** dalam pencapaian Indikator Kinerja terkait predikat SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pendampingan dilakukan khususnya pada penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA yang mengalami banyak pengembangan di tahun 2022.

Beberapa kegiatan pendampingan yang dilakukan selama tahun 2022:

- Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Maret 2022
- Pendampingan penyusunan PK dilakukan secara daring pada Maret 2022
- Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK Tahun 2022

- Sosialisasi Perjanjian Kinerja Dirjen Kebudayaan Th 2022 kepada seluruh UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri dilakukan secara daring pada Agustus s.d. September 2022 bersama Biro Perencanaan
- Sosialisasi PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Juni 2022
- Pendampingan penyusunan PK revisi pada Desember 2022
- Evaluasi program dan kegiatan internal Triwulanan bersama seluruh satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Melaksanakan pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dan seluruh satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

### Hambatan & Permasalahan

- Mundurnya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menunggu terbitnya Permendikbudristek tentang Perubahan Rencana Strategis 2022-2024
- Metode penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berbeda dengan tahun sebelumnya
- Beberapa data dukung yang diperlukan untuk evaluasi mandiri SAKIP belum tersedia
- Terdapat perubahan metode, tata cara, dan daftar data dukung evaluasi mandiri dari tahun sebelumnya

### Langkah Antisipasi

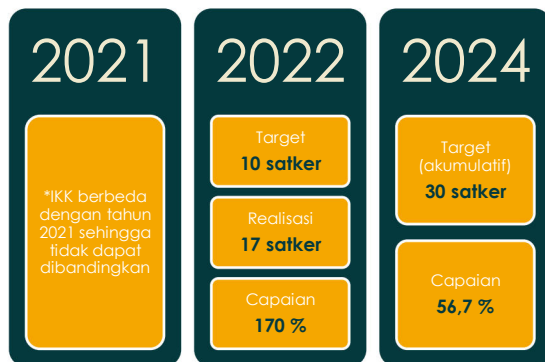
- Penyusunan PK Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sambil menunggu terbitnya Renstra Revisi 2022-2024
- Melaksanakan asistensi penyusunan RKT Tahun 2023 kepada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Mendorong satker/UPT untuk melakukan percepatan dalam melengkapi data dukung
- Mempelajari metode evaluasi mandiri yang baru dan melengkapi data dukung evaluasi mandiri SAKIP

### Strategi

- Menyiapkan draft Perjanjian Kinerja tahun 2022 di awal tahun sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah diusulkan pada revisi Rencana Strategis 2022-2024
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya mengenai peraturan terbaru terkait implementasi dan evaluasi SAKIP
- Menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku Eselon I untuk menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis
- Koordinasi dan pendampingan dalam setiap tahap penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA

## IKK 3.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

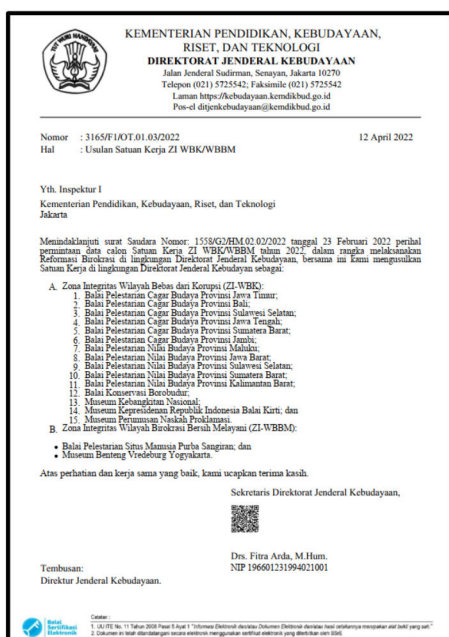
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.2 ini berbeda dengan IKK tahun sebelumnya (2021) sehingga tidak dapat dibandingkan, dimana IKK tahun 2021 adalah “Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM” dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 IKK Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 17 satker dari 10 satker yang ditargetkan telah diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.



Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu elemen pendukung tercapainya Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung program pembangunan Zona Integritas dengan mengusulkan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan 15 satuan kerja untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 2 satuan kerja untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) dengan diterbitkannya surat Nomor 3165/F1/OT.01.03/2022.

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK):



- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali;
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat;
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi;
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku;
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat;
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat;
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat;
- Balai Konservasi Borobudur;
- Museum Kebangkitan Nasional;
- Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti; dan
- Museum Perumusan Naskah Proklamasi.



## B. Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM):

1. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
2. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

Program Penguatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sepanjang tahun 2022 berupa sosialisasi dan pendampingan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan Januari - Februari 2022 di BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB Manado, BPNB Maluku Utara.
- Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan April 2022 di BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sumatera Barat, BPCB Sumatera Barat, BPCB Jawa Timur, BPCB Jawa Tengah, BK Borobudur, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, BPCB Jambi, BPNB Kalimantan Barat, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022, bertempat di Museum Benteng Benteng Vredenburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB Sumatera Barat.
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 18 April 2022 di Museum Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
- Penilaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 6 Juni 2022.
- Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 21 September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek (SIAZIK).



### Hambatan & Permasalahan

- Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai
- Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikasi SIAZIK menjadi acuan pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM, pada Direktorat Jenderal Kebudayaan belum memenuhi minimal jumlah responden
- Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

### Langkah Antisipasi

- Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Melakukan koordinasi dalam pengisian LKE PMPRB ZI-WBK/WBBM dan melengkapi dokumen pendukungnya.
- Penyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan, serta penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan

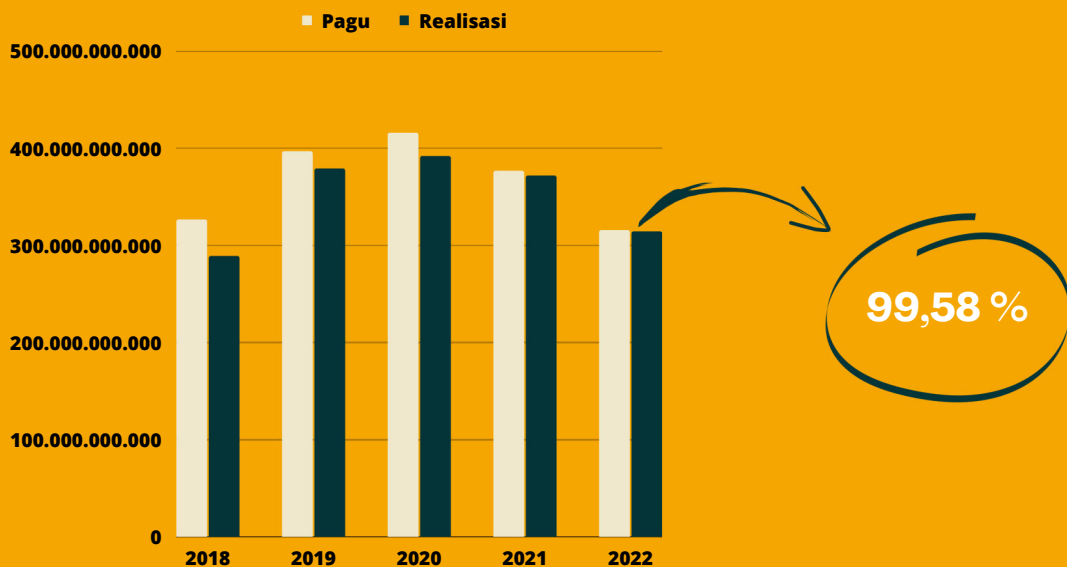
### Strategi

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM
- Mendorong Satuan Kerja untuk memperbaiki system reformasi birokrasi di masing-masing unit
- peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai

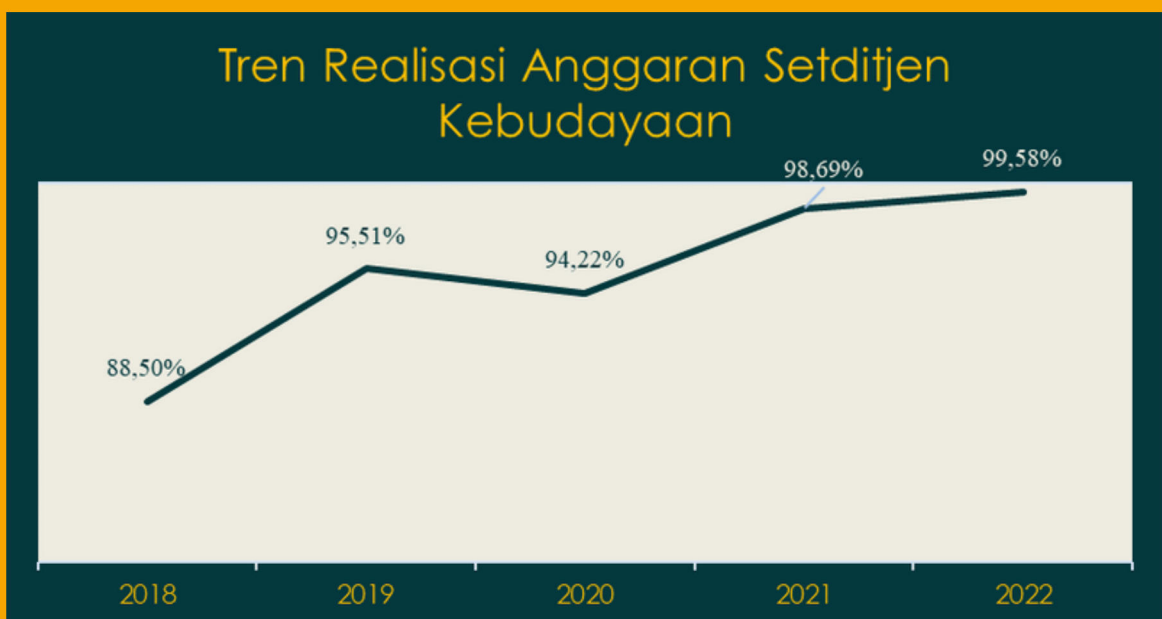


# Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2022 sebesar Rp 352.349.369.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2022 DIPA Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp 315.340.632.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 314.007.893.897 dengan persentase daya serap sebesar 99,58%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan daya serap. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja.



	2018	2019	2020	2021	2022
■ Realisasi	288.763.141.045	378.747.727.136	391.598.427.573	371.506.605.706	314.007.893.897
■ Pagu	326.287.120.000	396.547.527.000	415.614.189.000	376.440.479.000	315.340.632.000



# Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 2.98% atau sebesar Rp 9.391.649.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 315.340.632.000 dengan rata-rata capaian IKK 176.75% dari empat Indikator Kinerja Kegiatan. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Penghematan kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan dan Even Prioritas Bidang Kebudayaan
2. Pergeseran anggaran dari belanja pegawai ke operasional untuk satker/unit lain
3. Terdapat penambahan blokir untuk *automatic adjustment*

Refocussing anggaran juga dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Penyelenggaraan G20, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, dan Persiapan *Qatar Year of Culture*.



## Inovasi



- Pengembangan aplikasi BMN
- Pengembangan aplikasi Data Pokok Kebudayaan dan PPKD
- Melakukan Inovasi peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi baru (Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, dan BLU Museum dan Cagar Budaya)
- Menggunakan absensi sensor wajah untuk peningkatan kinerja pegawai.
- Melakukan screening kesehatan seluruh pegawai setditjen kebudayaan melalui Medical Check Up.
- Melakukan screening anti narkoba kepada pegawai setditjen kebudayaan



# Penghargaan

Pada tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memperoleh penghargaan berupa "Pimpinan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik" yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 381/P/2022 tentang Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 381/P/2022  
TENTANG  
PIMPINAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK  
TAHUN 2022

## PIMPINAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK TAHUN 2022

### A. Pimpinan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2022 di Lingkungan Unit Kearsipan II

No.	Pimpinan Unit Pengolah	Nilai	Kategori
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	98.92	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	98.89	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	98.70	AA (Sangat Memuaskan)

### B. Pimpinan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2022 di Lingkungan Unit Kearsipan III

No.	Pimpinan Unit Pengolah	Nilai	Kategori
1.	Kepala Museum Nasional	98.48	AA (Sangat Memuaskan)

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

  
Dian Wahyuni



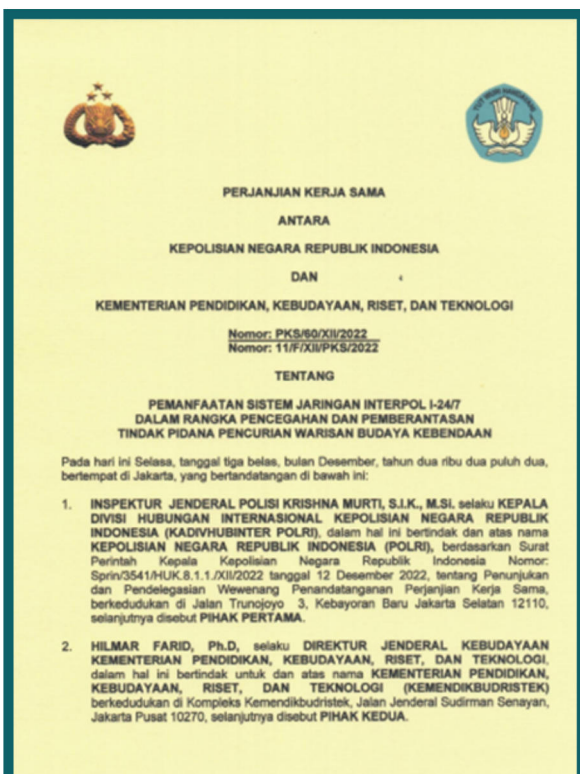
# Program Crosscutting

## Kerja sama pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dengan LPDP Kementerian Keuangan RI

Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas tata kelola dan keberlanjutan organisasi masyarakat di bidang kebudayaan melalui pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan RI. Dana Abadi Kebudayaan merupakan dana yang diakumulasi dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dalam kerja sama ini LPDP berkewajiban untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana kepada penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan dimana manajemen pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.



## Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

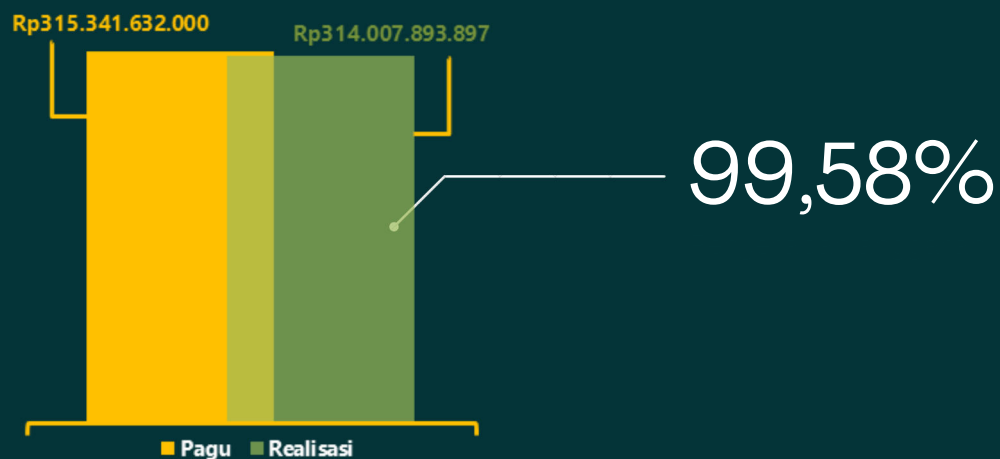
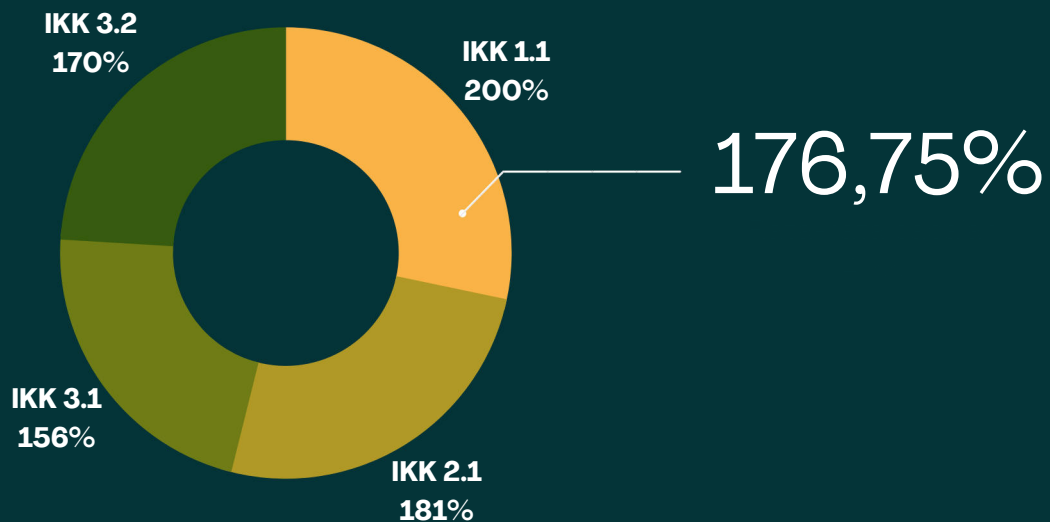


Tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pertemuan dengan Divisi Hubungan Internasional POLRI untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dengan Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerja sama ini bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian warisan budaya kebendaan dengan memanfaatkan akses salah satu jenis data base Interpol yaitu Stolen Works of Art dan Purple Notices yang memungkinkan dapat memperoleh informasi dan data barang temuan warisan budaya kebendaan tersebut di seluruh negara anggota Interpol.

# Bab IV Penutup

## Ringkasan Kinerja



Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil karena capaian rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 176,75% dari empat indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut turut didukung oleh kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 314.007.893.897 atau 99,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp 315.340.632.000.

**Dari hasil evaluasi kinerja,  
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian**



**1**

Koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan

---

**2**

Percepatan pengelolaan reorganisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, implementasi reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, pelaksanaan tugas dan fungsi serta yang lainnya

---

**3**

Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya yang masih perlu untuk ditindaklanjuti

---



# Langkah Kerja ke Depan

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

01.

Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA

02.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP unit kerja

03.

Melakukan peraikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

04.

Melakukan pendampingan kepada unit kerja/satker dalam rangka implementasi SAKIP serta penyusunan dokumen pendukungnya yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA

05.

Penyelesaian reorganisasi satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup pemutakhiran informasi kinerja, penataan pegawai, dan penataan Aset BMN.

06.

Supervisi sumber daya manusia di satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan guna peningkatan kompetensi pegawai



# *Lampiran*



- **Surat Pernyataan telah Direviu**
- **Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (awal)**
- **Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Akhir)**
- **Pengukuran Kinerja Tahun 2022**
- **Rencana Aksi Tahun 2022**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Rori Virgo Panjaitan

197809282009120001



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Fitra Arda**

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Fitra Arda**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	62.5
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 285.670.205.000
2	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 66.679.164.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 352.349.369.000</b>

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Fitra Arda**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Fitra Arda**

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**



## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	62.5
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 52.516.307.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 262.824.325.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 315.340.632.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	1	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 1	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 1 TW4 : 2	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> G20 - Kick Off G20 - Koordinasi dengan negara TROIKA (Italia &amp; India) - Koordinasi dan rapat pleno dengan Direktorat di Ditjen Kebudayaan - Penyusunan kepanitian G20 bidang Kebudayaan - Koordinasi dengan organisasi internasional UNESCO - Penyusunan Concept Note, Academic Paper, Join Ministerial Statement G20 bidang Kebudayaan - Bilateral meeting dengan 19 negara anggota dan 9 negara undangan G20 - Penyusunan strategi Komunikasi dengan BKHM &amp; agensi konsultan Ogilvy Indonesia - Konferensi Pers dan Pelaksanaan The First Senior Officials Meeting (SOM) secara daring - Pengiriman surat dukungan kepada Instansi, Pemda dan Pemangku Kepentingan - Tinjauan lokasi pelaksanaan G20 bidang Kebudayaan di Kawasan Percandian Borobudur - Pertemuan dengan para Dubes RI di LN secara daring - Pertemuan dengan Para Dubes Asing di Jakarta</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Perbedaan waktu antara Indonesia dengan setiap negara G20 untuk berkoordinasi dan komunikasi</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Menyesuaikan dengan waktu yang paling tepat</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> - Rapat pleno setiap minggu dipimpin Dirjen Kebudayaan membahas progress masing-masing Direktorat; - Pertemuan dengan UNESCO headquarter (daring) dan UNESCO Office Jakarta (luring) membahas draf terms of reference dari Global Arts and Culture Recovery Fund (GACRF); - Penyusunan draf Joint Ministerial Statement (JMS) bersama narasumber dan pendistribusian draf pertama JMS kepada negara anggota; - Koordinasi persiapan the Second Senior Officials Meeting (SOM) secara daring; - Koordinasi program G20 bidang kebudayaan bersama Co-Sherpa Indonesia Kemlu; - Penyampaian undangan the Second SOM kepada negara anggota dan undangan lainnya; - Sosialisasi dan diskusi program G20 bidang pendidikan dan kebudayaan bersama para Dubes RI secara daring; - Sosialisasi program G20 kebudayaan 2022 kepada duta besar negara G20 dan undangan di Museum Nasional; - Koordinasi persiapan gala dinner para Menteri bersama koordinator chef; - Penyediaan bahan konferensi pers dan komunikasi publik the Second SOM; - Koordinasi dengan representatif Global Pop Icon (Anggun, NCT, UNESCO Goodwill Ambassador).</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Terdapat kendala koordinasi dengan negara anggota G20 karena pada bulan Juni-Juli-Agustus banyak negara yang sedang libur musim panas, sehingga responnya agak lambat</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Meminta bantuan kedutaan negara yang bersangkutan di Jakarta dan juga KBRI di negara setempat untuk membantu mempercepat respon</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kemendikbudristek telah melaksanakan Culture Ministers Meeting (CMM) adapun rangkaian acaranya salah satunya 1st Senior Officials Meeting (SOM) G20 yang dilaksanakan tanggal 13 september 2022 di The Heritage Convention Center, Plataran Heritage Borobudur Hotel. adapun rangkaian Culture Ministers Meeting G20 adalah: 1. Ruwat Nusantara: Festival Upacara Adat bagian agenda G-20 Culture Ministers Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 di GOR Amongraga, Yogyakarta yang di hadirinya ratusan perwakilan masyarakat adat berbagai wilayah Indonesia. 2. Sarasehan bagian agenda G-20 Culture Ministers Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 yang dihadiri para delegasi, peserta Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya (PeKaT), peserta Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) serta masyarakat di Kawasan Borobudur. Para peserta dan tamu delegasi mengunjungi Pameran Produk Kreatif, Kuliner, dan Kesenian Lokal Desa Kawasan 3. The third G20 Culture Senior Officials Meeting (SOM) telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 yang berlokasi di The Heritage Convention Center, Plataran Heritage Borobudur Hotel. 4. Kirab Budaya G20 bertajuk Mulih Pulih dilaksanakan pada tanggal 12 september 2022 berlokasi di dari Jln. Balaputradewa - Gerbang marga utama concrouse - Taman Lumbini Candi Borobudur. melibatkan sekitar 2.000 warga dari 20 desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 5. Pameran Expanded Media INDONESIA BERTUTUR lokasi di kawasan borobudur.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Secara keseluruhan penyelenggaraan Culture Ministers meeting (CMM) tidak ada kendala berjalan dengan lancar, namun dalam pelayanan panitia yang beriklan masih kurang maksimal hal ini disebabkan karena perubahan jadwal yang mendadak menyebabkan terjadi miskoordinasi anatar panitia sehingga mempengaruhi pelayanan yang diberikan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Rapat Koordinasi dengan koordinator panitia dari masing2 bidang untuk menyusun jadwal perubahan dan menyiapkan sarpras di lapangan sebelum acara rangkaian G20 dimulai.</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> dilaksanakannya Pameran dan Festival 'Kopi Togetherness', yang juga menjadi kick-off dari kerjasama bilateral Indonesia dan Qatar bertempat di Area Sunken Museum Nasional Indonesia pada tanggal 19 November s.d. 18 Desember 2022</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Tidak ada kendala, Kegiatan telah dilaksanakan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Tidak ada strategi tindak lanjut, Kegiatan telah dilaksanakan</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 150</b> <b>TW4 : 150</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 272</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  - Penyusunan Petunjuk Teknis FBK 2022 - Pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran FBK 2022  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  - Permasalahan sistem website FBK dari waktu ke waktu - Saat launching Dana Indonesiana, seluruh data FBK pindah ke domain baru  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  - Sosialisasi dan pendampingan ke pendaftar terkait kendala yang dialami  - Sosialisasi terkait dengan perpindahan laman ke Dana Indonesiana, serta perpindahan dilakukan setelah pendaftaran FBK ditutup</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  - Pendaftaran ditutup dan diperoleh 1988 proposal; - Komite seleksi telah melakukan penilaian untuk tahap seleksi substansi terhadap proposal yang masuk (total yang lolos seleksi substansi sebanyak 76 proposal); - Telah dilaksanakan seleksi administrasi untuk 76 proposal yang lulus seleksi substansi; - Telah mulai dilakukan verifikasi lapangan untuk 67 proposal yang menyerahkan berkas administrasi  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  - Proses penilaian proposal oleh komite seleksi kurang sesuai dengan timeline yang telah dibuat sehingga waktu sedikit molor; - Terdapat error pada pemindahan sistem dari fbk.id ke laman danaindonesiana.kemdikbud.go.id; - Ada beberapa pengusul yang tidak menerima hasil seleksi (kendala saat pengiriman pengumuman); - Terdapat sedikit kemunduran untuk waktu mulai verifikasi lapangan akibat kebutuhan persiapan yang cukup lama  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  - Terdapat helpdesk untuk masyarakat menanyakan informasi kapan saja - Tim website segera mencari sumber error untuk segera menyelesaikan masalah terkait pemindahan sistem - Ditambahkan jumlah personil verifikator lapangan agar dapat melaksanakan verifikasi lapangan sesuai jadwal</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Pelaksanaan lokakarya Fasilitasi Bidang Kebudayaan (APBN) pada tanggal 18-21 Juli 2022, peserta yang diundang berjumlah FBK 55, FKBM 16, FKPB 13, FSK 1, Dana Pengembangan Prioritas 48. Penerima yang lulus lokakarya berjumlah FBK 49, FKBM 16, FKPB 12, FSK 1 dan Dana pengembangan prioritas 46. Pencairan dilakukan tanggal 25-26 Juli, untuk FBK dan Dana Pengembangan Lanjutan Keg Prioritas tahap awal pencairan 80%, FKPB-FKBM-FSK dicairkan 100%. 2. Pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan setelah dana masuk ke rekening penerima dan maksimal pelaksanaan 10 November tahun 2022 sesuai dalam juknis. 3. Pelaporan awal dilakukan setelah dana masuk ke rekening penerima, khusus FBK dan Dana pengembangan Prioritas harus memberikan laporan kemajuan untuk pencairan 20%, jika laporan kemajuan sudah sesuai baru akan dilakukan pengajuan pencairan dana 20%. 4. Pelaksanaan lokakarya Fasilitasi Bidang Kebudayaan (Dana Indonesiana) pada tanggal 20-24 September 2022. 5. Penandatanganan kontrak antara penerima Fasilitasi Bidang Kebudayaan dengan Ditjen Kebudayaan.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Beberapa pengusul/calon penerima tidak melengkapi persyaratan administrasi seperti SK Kemenkumham, Akta Notaris, buku rekening bank, dll yang dapat menyebabkan potensi gugurnya pengusul/calon penerima ke tahap penandatanganan kontrak.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  memberikan kelonggaran waktu kepada calon penerima untuk dapat memenuhi kelengkapan syarat administrasinya sampai dengan 24 Oktober 2022.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pencairan dana 20% bagi penerima yang sudah mengirimkan laporan kemajuan (Kategori FBK dan Dana pengembangan Prioritas)  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  laporan kemajuan dan laporan akhir dari penerima bantuan lambat dikirimkan  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  dilakukan komunikasi secara intensif kepada masing-masing penerima bantuan yang belum mengirimkan laporan</p>
---	--	---	---------------------------	-----	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	62.5	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 62.5</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 97.5</b>	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> - Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Kebudayaan sebagai salah satu unit kerja di bawah Ditjen Kebudayaan - Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 - Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bersama seluruh UPT di Lingkungan Ditjen Kebudayaan - Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK Tahun 2022 bersama seluruh UPT di Lingkungan Ditjen Kebudayaan - Melaksanakan Rapat Sosialisasi Perjanjian Kinerja Dirjen Kebudayaan Th 2022 kepada seluruh UPT - Melaksanakan evaluasi internal atas IKP Dirjen Kebudayaan. <b>Kendala / Permasalahan :</b> - Belum terbitnya Renstra Revisi Tahun 2022-2024 hingga bulan Maret 2022 menyebabkan penyusunan PK dan Rencana Aksi yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Januari mundur. - Penyusunan RKT tahun 2023 yang berbeda dengan tahun sebelumnya (dari SPASIKITA ke e-planning) menyebabkan beberapa operator mengalami kesulitan dalam proses penyusunannya. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> - Penyusunan PK Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sambil menunggu terbitnya Renstra Revisi 2022-2024 - Melaksanakan asistensi penyusunan RKT Tahun 2023 kepada UPT di lingkungan Ditjenbud  <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> - Sosialisasi PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Sosialisasi Pengisian Kertas Kerja Evaluasi sesuai PermenPAN RB No 88 tahun 2021; - Melaksanakan pengukuran kinerja Triwulan 1 (Ditjen Kebudayaan dan Sekretariat Ditjen Kebudayaan); - Rapat Sosialisasi PK Dirjenbud dan Setditjenbud; - Rapat Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Ditjen Kebudayaan bersama seluruh satker dan UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan; - Menyiapkan kelengkapan data dukung evaluasi mandiri SAKIP tahun 2022; <b>Kendala / Permasalahan :</b> - beberapa data dukung yang diperlukan untuk evaluasi mandiri SAKIP belum tersedia; - beberapa operator yang menangani sakip masih belum sepenuhnya memahami mekanisme SAKIP (beberapa satker mengalami pergantian pegawai yang menangani SAKIP). <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan pendampingan kepada satker dalam memahami mekanisme SAKIP dan mendorong percepatan dalam melengkapi data dukung  <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2. Menyiapkan data dukung evaluasi mandiri SAKIP 3. Melakukan evaluasi mandiri SAKIP dengan pendampingan oleh Biro Perencanaan <b>Kendala / Permasalahan :</b> ada perubahan metode, tata cara, dan daftar data dukung evaluasi mandiri dari tahun lalu <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempelajari metode evaluasi mandiri yang baru dan melengkapi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi mandiri SAKIP  <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melaksanakan rapat evaluasi triwulan; 2. Melaksanakan pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dan seluruh satker/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan; 3. Menyiapkan data dukung pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022. <b>Kendala / Permasalahan :</b> beberapa auditor dari tim Inspektorat Jenderal yang bertugas untuk mengevaluasi satuan kerja tidak dapat hadir dalam pendampingan peningkatan evaluasi SAKIP Tahun 2022 <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> evaluasi untuk peningkatan nilai SAKIP dilakukan melalui metode daring
---	---	---	---	------	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[SK 3.0] Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 10</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 17</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  - Telah diterbitkan Surat Nomor 3165/F1/OT.01.03/2022 hal Usulan Satuan Kerja ZI WBK/WBBM tanggal 12 April 2022 yang berisi tentang pengusul Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) sebanyak 2 UPT/Satuan Kerja. - Melaksanakan koordinasi pengisian LKE PMPRB ZI WBK/WBBM dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  - Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada Pegawai di lingkungan Ditjen Kebudayaan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  - Melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja WBK/ WBBM yang dilaksanakan pada Bulan Januari - Februari 2022 diantaranya BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB Manado, dan BPNB Maluku Utara.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  - Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022 di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB Sumatera Barat; - Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 18 April 2022 di Museum Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi; - Penilaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal tanggal 6 Juni 2022, nilai setdijenbud untuk total Komponen pemenuhan 12, 82 dari bobot nilai 14,6. Hal ini perlu adanya peningkatan kualitas layanan public. Untuk total nilai komponen reform Setdijenbud 18,53 dari bobot nilai 21,7.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  - Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikasi siazaik menjadi acuan pengusulan satker calon WBK, pada Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah respon; - Perubahan organisasi pada upt menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi ditjen kebudayaan namun menjadi kendala dalam pencanangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi lanyanan perubahan organisasi yang terjadi.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  - Penyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan; - Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan; - Penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  1. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yang dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2. Dilakukan penataan organisasi/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan: - 10 museum/Galeri/Balai Konservasi/Balai Pelestarian Situs diintegrasikan menjadi 1 UPT yaitu Museum dan Cagar Budaya - Integrasi UPT Pelestarian Cagar Budaya dan UPT Pelestarian Nilai Budaya menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan dan - dibentuk UPT Balai Media Kebudayaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan kebudayaan. 3. Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). 4. Pemantauan untuk kelancaran pembangunan, pemantauan, dan evaluasi zona integritas, pengisian LKE PMPZI dilakukan melalui sistem informasi asesmen zona integritas kemendikbudristek (SIAZIK)</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Aplikasi SIAZIK menjadi acuan penilaian mandiri pembangunan zona integritas. pengisian respon responden tentang pelayanan pada unit kerja Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah respon; 2. Penataan organisasi pada UPT meningkatkan area penguatan organisasi pada Ditjen Kebudayaan, akan tetapi menjadi kendala dalam pencanangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Penetapan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan dan Balai Media Kebudayaan. 2. Penetapan Peta proses bisnis mengenai tata hubungan kerja antar unit organisasi 3. Penetapan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Usulan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) sebanyak 2 UPT/Satuan Kerja belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Aplikasi SIAZIK menjadi acuan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada unit kerja Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah respon; 2. Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terinternalisasi kepada seluruh pegawai.</p>
---	--	--	--------	----	---	---	--

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	<b>Even Prioritas Bidang Kebudayaan</b>	<b>1.0000</b>	<b>Kegiatan</b>	0	0	1	2	<b>Rp. 14.128.338.000</b>
2	[101] G20 dan Festival Qatar			0	0	1	2	Rp. 14.128.338.000
3	<b>Fasilitasi Bidang Kebudayaan</b>	<b>150.0000</b>	<b>Kelompok Masyarakat</b>	0	0	201	272	<b>Rp. 38.387.969.000</b>
4	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan			0	0	201	272	Rp. 38.387.969.000
5	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	1	1	1	1	<b>Rp. 96.838.819.000</b>
6	[100] Layanan Bidang Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian			1	1	1	1	Rp. 32.559.643.000
7	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan			1	1	1	1	Rp. 22.947.355.000
8	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN			1	1	1	1	Rp. 12.889.815.000
9	[103] Layanan Umum Kerjasama dan Kehumasan			1	1	1	1	Rp. 24.039.775.000
10	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan			1	1	1	1	Rp. 4.402.231.000
11	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	1	1	1	2	<b>Rp. 165.985.506.000</b>
12	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 151.086.015.000
13	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	1	1	1	Rp. 14.899.491.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 315.340.632.000</b>

Jakarta, 13 Januari 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Fitra Arda**



**Rencana Aksi**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Tahun 2022**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	1	0	0	0	1
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150	0	0	150	150
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	62.5	0	0	0	62.5
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10	0	0	0	10



## Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Even Prioritas Bidang Kebudayaan	1	Kegiatan	0	0	0	1	Rp. 13.000.000.000
2	[101] G20 dan Festival Qatar	1	kegiatan	0	0	0	1	Rp. 13.000.000.000
3	Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	Kelompok Masyarakat	0	0	150	150	Rp. 53.679.164.000
4	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	Kelompok Masyarakat	0	0	150	150	Rp. 53.679.164.000
5	Layanan Umum	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 101.838.819.000
6	[100] Layanan Bidang Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 35.822.000.000
7	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 25.542.693.000
8	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 11.011.956.000
9	[103] Layanan Umum Kerjasama dan Kehumasan	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 24.942.749.000
10	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 4.519.421.000
11	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 181.213.934.000
12	[001] Gaji dan Tunjangan	12	layanan	3	6	9	12	Rp. 169.137.357.000
13	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	layanan	0	0	0	1	Rp. 12.076.577.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 349.731.917.000</b>

Jakarta, 19 April 2022

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**



**Fitra Arda**



Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi